



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 204 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penambahan kegiatan dan indikator sub kegiatan pada Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2026.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

BAB III ...

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
BAB VIII	: PENUTUP.

- (2) Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1072

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 204 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

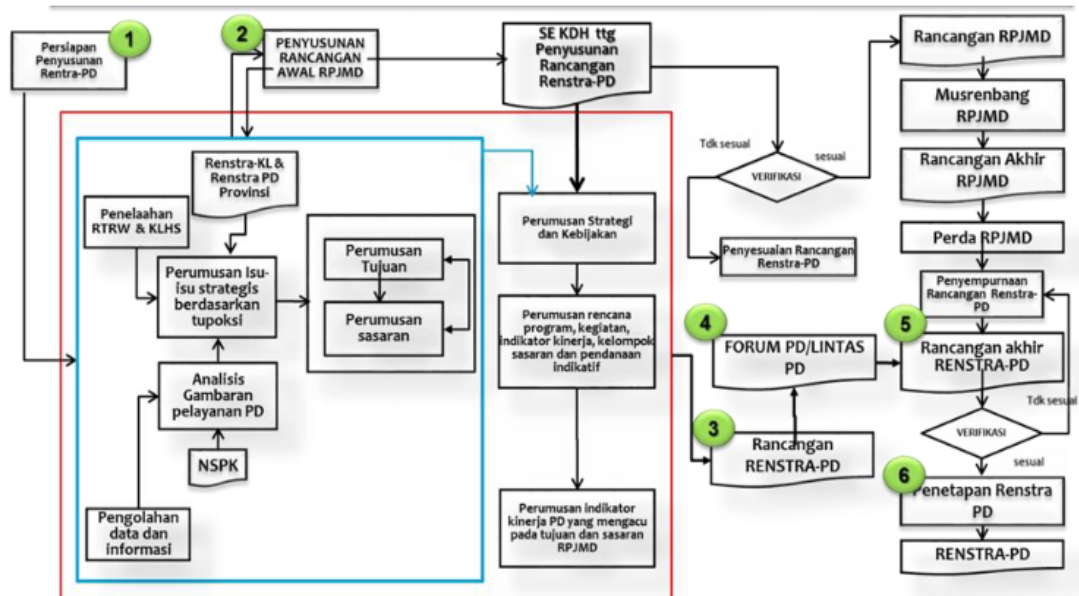
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Bapelitbangda Kota Batam disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD

Proses penyusunan Renstra Bapelitbangda dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
3. Penyusunan Rancangan Renstra
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
5. Penetapan Renstra

Persiapan penyusunan Renstra diawali dengan pembentukan tim penyusunan Renstra melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud kemudian dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah, paling lambat 1 bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

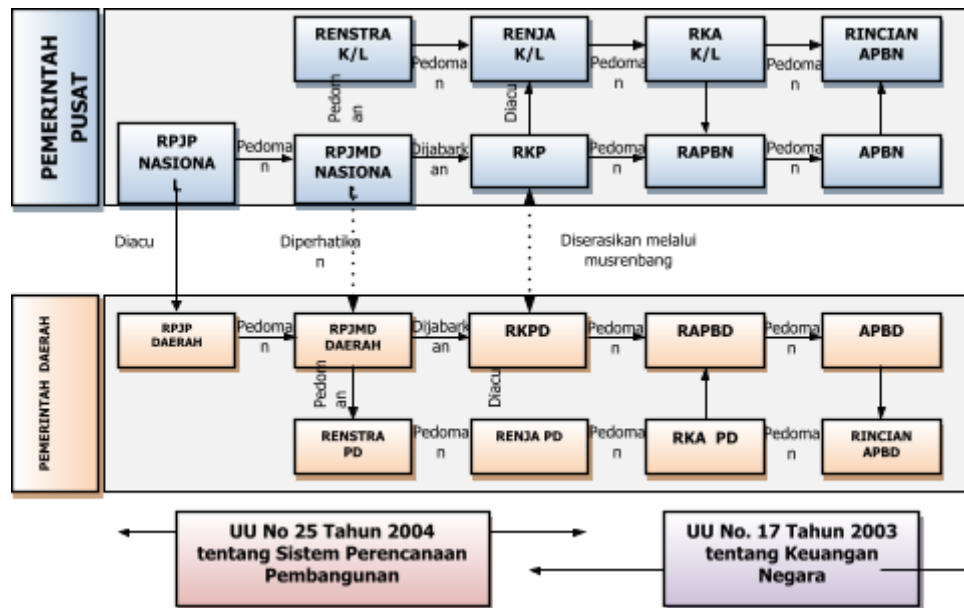
Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang stratanya lebih tinggi dalam artian dokumen induk dari perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota seperti dokumen RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Renstra PD sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Selanjutnya, Renstra PD juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja PD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD setiap tahunnya yang selanjutnya akan menjadi rincian APBD.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertingkat. Oleh karena itu Renstra PD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RenstraPD harus sinkron dan sinergi antar PD yang merupakan tugas Bapelitbangda dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Renstra PD

akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja PD untuk setiap tahunnya, dan harus dijadikan pedoman bagi penyusunan RKA PD yang merupakan masukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra PD, serta perencanaan keuangan daerah.



Gambar 1.2 Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat maupun Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor)
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama periode 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam setiap tahunnya.
2. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program Pemerintah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026 ini terdiri atas 8 (delapan) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah dengan tipe A.

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2022, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah, susunan organisasi Bapelitbangda terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD.

A. KEPALA BADAN

- Tugas Pokok: memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan bidang Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

- Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.
- Fungsi :
- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Badan.
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan.
 - c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi.
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD.
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

C. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

D. BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

E. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan
 - b. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

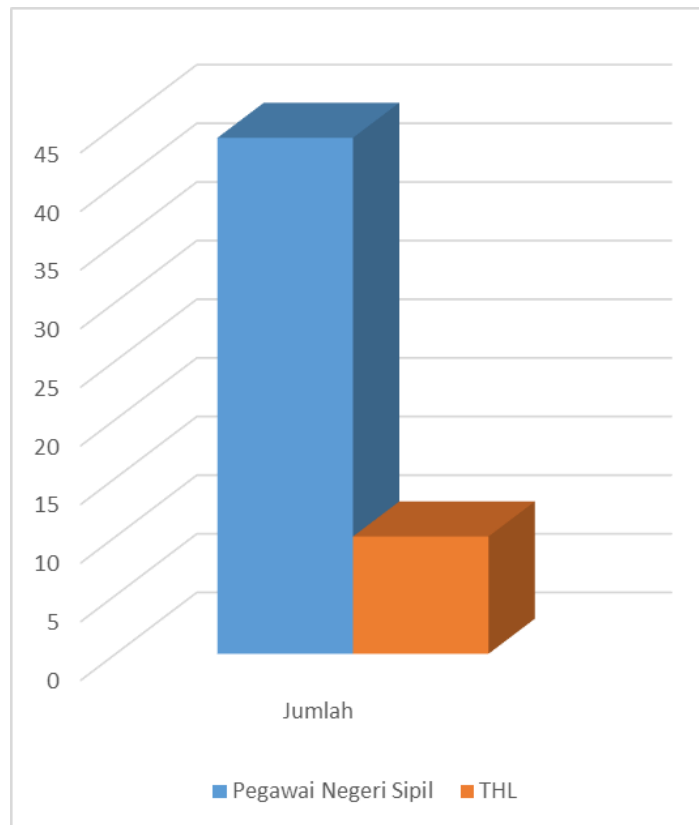
- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bapelitbangda Kota Batam memiliki 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Harian Lepas untuk melaksanakan tugas pada Kantor Bapelitbangda Kota Batam, untuk melihat lebih jelas tentang jumlah komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Diagram II.1

Jumlah PNS dan THL

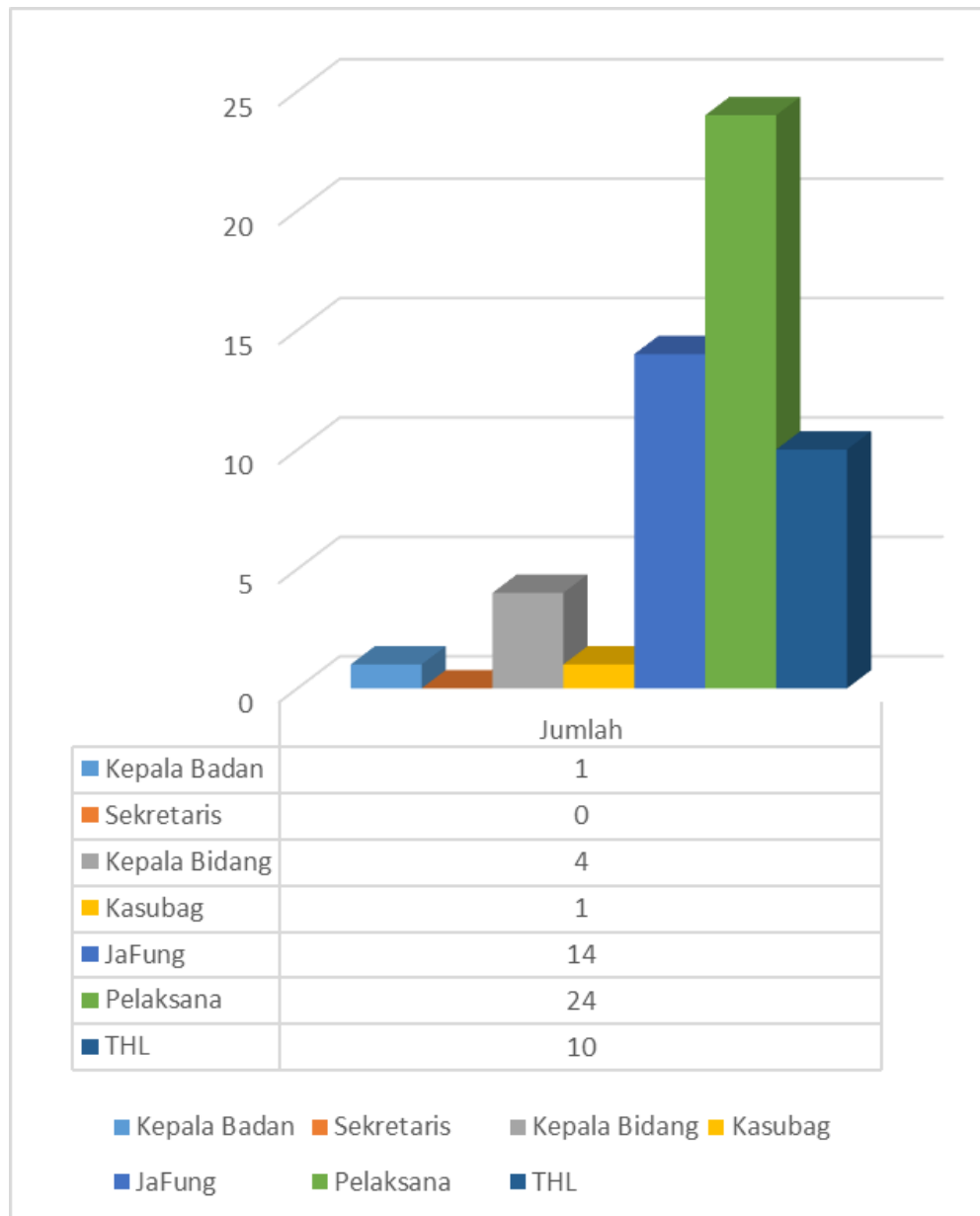


Sumber : Bapelitbangda Oktober 2022

Dari jumlah pegawai sebanyak 54 orang terbagi pada setiap bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diagram II.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber : Bapelitbangda Oktober 2022

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka susah dalam bersaing dalam era globalisasi.

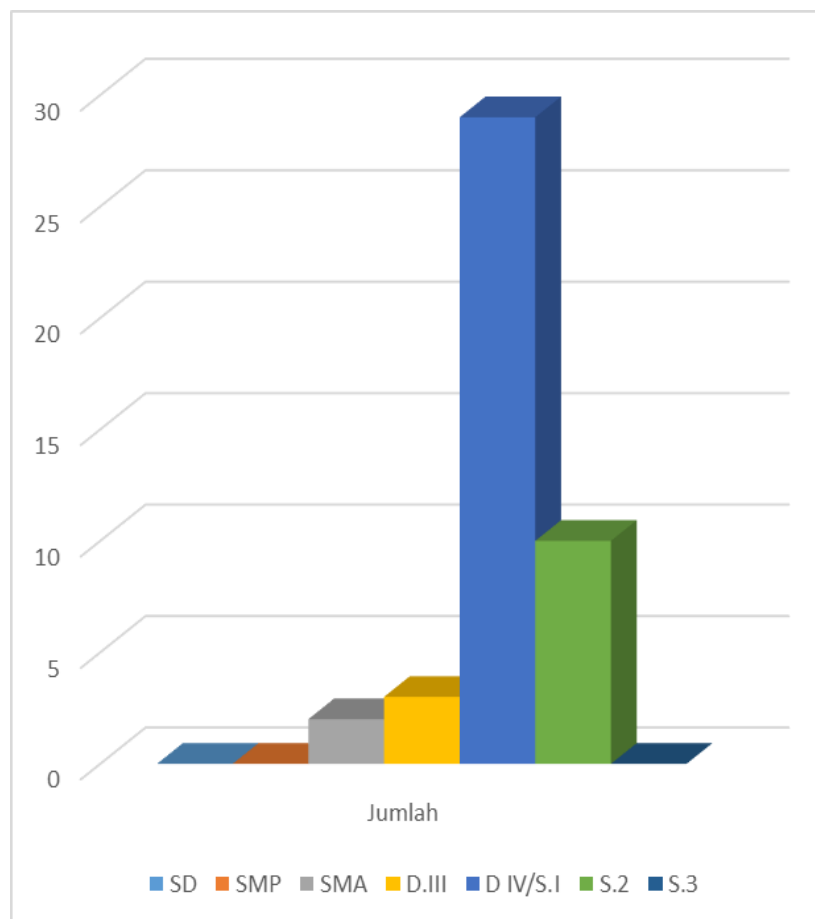
Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan latar belakang pendidikan pegawai akan dapat memberikan bantuan didalam melakukan pekerjaan, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk

memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Diagram II.3

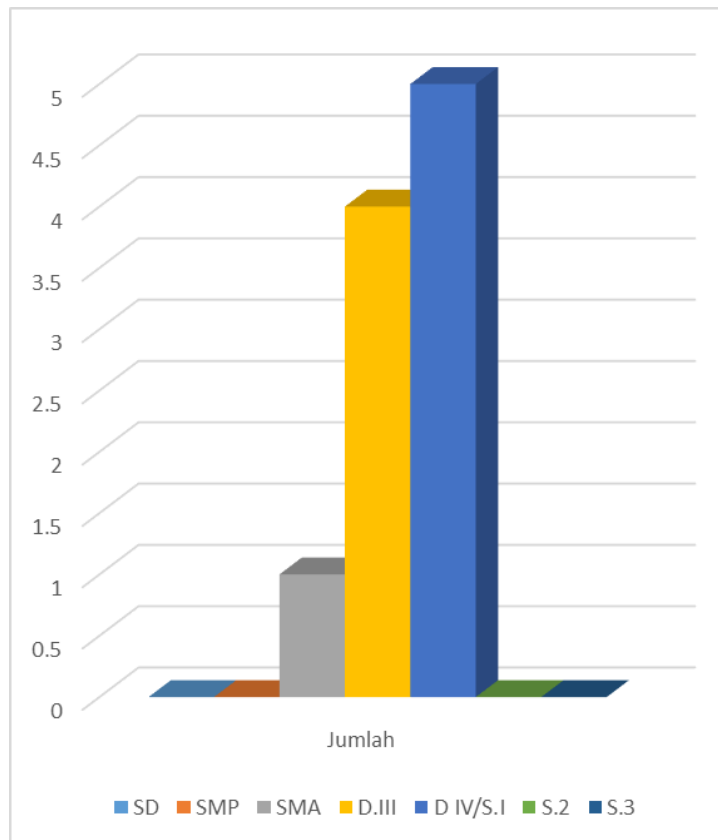
Jumlah PNS Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Bapelitbangda Oktober 2022

Tabel II.4

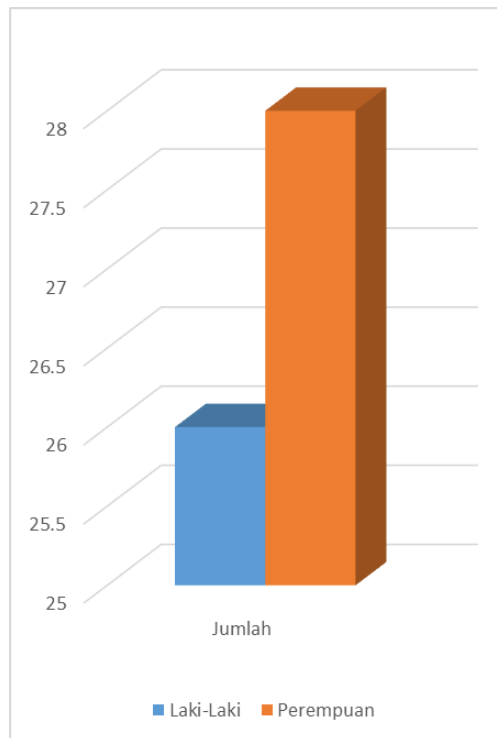
Jumlah THL Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Bapelitbangda Oktober 2022

Diagram II.5

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Bapelitbangda Oktober 2022

Berdasarkan data kepegawaian di atas, seluruh jabatan di Bapelitbangda terisi oleh pejabat struktural. Namun, terdapat ketimpangan dari sisi ketersediaan staf, dimana dari 34 orang staf, terdiri dari 24 orang PNS dan 10 orang THL. Sehingga masih dibutuhkan penambahan staf untuk mendukung kelancaran tugas pada masing-masing bidang.

Secara kualitas, berdasarkan jenjang Pendidikan, sebagian besar PNS atau sebanyak 34 orang PNS Bapelitbangda memiliki tingkat Pendidikan S1 dan terdapat 10 orang dengan tingkat Pendidikan S2. Dengan latar belakang Pendidikan tersebut, sangat memberi dampak positif pada pelaksanaan tupoksi Bapelitbangda. Namun demikian, dengan perkembangan peraturan dan perubahan yang sangat dinamis pada kebijakan-kebijakan pemeritahan, maka kualitas SDM Perencana dan Litbang harus terus di *upgrade*, baik melalui diklat/bimtek/workshop dan lain-lain.

Tabel II.1
Sarana Prasarana Bapelitbangda

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	KONDISI
I	SEKRETARIAT			
1	Kendaraan Roda 4	4 unit	1 Toyota Altis 1 Toyota Corolla 1 Toyota Avanza 1 Toyota Unser	Sedan 2 unit kondisi Baik Station Wagon 2 unit kondisi Baik
2	Kendaraan Roda 2	1 unit	Honda GL 15 A1 RR MT	Sepeda Motor 1 unit Kondisi Baik
3	Komputer	10 unit	Sekretaris : 1 unit Subbag Keuangan : 3 unit Subbag Program : 2 unit Subbag Umpeg : 2 unit Gudang : 2 unit	Kondisi baik 5 unit Kondisi rusak ringan 3 unit Kondisi rusak berat 2 unit
4	Laptop	6 unit	Subbag Keuangan : 5 unit Subbag Program : 1 unit Subbag Umpeg : 1 unit Gudang : 2 unit	Kondisi baik 6 unit Kondisi rusak ringan 1 unit Kondisi rusak berat 2 unit
5	Printer	22 unit	Sekretaris : 1 unit Subbag Keuangan : 3 unit Subbag Program : 3 unit Subbag Umpeg : 4 unit Gudang : 11 unit	Kondisi baik 11 unit Kondisi rusak berat 11 unit
6	Projector	3 unit	Ruang Rapat 2 unit Sekretaris 1 unit	Kondisi baik 2 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
7	TV	2 unit	Ruang Rapat 1 unit Ruang Tamu 1 unit	Kondisi baik 2 unit
8	Camera DLSR dan Drone	3 unit	Kasubag Keuangan 2 unit Gudang : 1 unit (drone)	Kondisi rusak ringan 2 unit Kondisi rusak berat 1 unit (drone)
9	Brankas	1 unit	Kasubag Keuangan 1 unit	Kondisi baik 1 unit
10	Mesin Presensi	1 unit	Kasubag Umpeg 1 unit	Kondisi baik 1 unit
11	Scanner ADF	3 unit	Subbag Keuangan : 1 unit Subbag Umpeg : 1 unit Gudang : 2 unit	Kondisi baik 2 unit Kondisi rusak berat 2 unit
II	BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
1	Komputer	7 unit	Kasubid Kesra 2 unit Kasubid Pemerintahan 3 unit Kasubid PPSDM 2 unit	Kondisi baik 6 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
2	Laptop	1 unit	Kabid PMM 1 unit	Kondisi baik 1 unit
3	Printer	7 unit	Kabid PMM 1 unit Kasubid Kesra 2 unit Kasubid Pemerintahan 2 unit Kasubid PPSDM 2 unit	Kondisi baik 7 unit
4	Projector	1 unit	Kabid PMM 1 unit	Kondisi baik 1 unit
III	BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM			
1	Kendaraan Roda 4	1 unit	1 Toyota Kijang	Kondisi rusak berat 1 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit	Honda GL 15 A1 RR MT	Kondisi baik 1 unit

3	Komputer	5 unit	Kasubid KIP 1 unit Kasubid SDA LH 2 unit Kasubid PPKUKM 2 unit	Kondisi baik 5 unit
4	Laptop	1 unit	Kasubid KIP 1 unit	Kondisi baik 1 unit
5	Printer	5 unit	Kasubid KIP 2 unit Kasubid SDA LH 1 unit Kasubid PPKUKM 2 unit	Kondisi baik 5 unit
6	Camera Drone	1 unit	Kabid Ekonomi SDA	Kondisi baik 1 unit
IV	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
1	Kendaraan Roda 2	1 unit	Honda GL 160 D	Kondisi rusak berat 1 unit
2	Komputer	8 unit	Kabid IPW 1 unit Kasubid PUPR 2 unit Kasubid KPSP 2 unit Kasubid PRPPW 2 unit	Kondisi baik 7 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
3	Laptop	3 unit	Kabid IPW 1 unit Kasubid PUPR 1 unit Kasubid PRPPW 1 unit	Kondisi baik 3 unit
4	Printer	3 unit	Kasubid PUPR 1 unit Kasubid KPSP 1 unit Kasubid PRPPW 1 unit	Kondisi baik 3 unit
5	Projector	1 unit	Kabid IPW 1 unit	Kondisi baik 1 unit
V	BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN PRENCANAAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN			
1	Komputer	8 unit	Kabid Litbang 1 unit Kasubid Ananlisis PESB 2 unit Kasubid Ananlisis KK 2 unit Kasubid Data PPMEP 2 unit	Kondisi baik 7 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
2	Laptop	2 unit	Kabid Litbang 1 unit Kasubid Ananlisis KK 1 unit	Kondisi baik 2 unit
3	Printer	4 unit	Kasubid Ananlisis PESB 1 unit Kasubid Ananlisis KK 1 unit Kasubid Data PPMEP 2 unit	Kondisi baik 4 unit
4	Scanner ADF	1 unit	Kabid Litbang 1 unit	Kondisi baik 1 unit
5	Projector	1 unit	Kabid Litbang 1 unit	Kondisi baik 1 unit

Berdasarkan data asset di atas, masih diperlukan penambahan sarana kantor dalam menunjang kelancaran tupoksi SDM Bapelitbangda, terutama berupa komputer, laptop, scanner dan printer.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Kota Batam yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, Konsultasi, dan Koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Jenis Pelayanan Bapelitbangda:

1. Pelayanan penyusunan dokumen RPJPD
2. Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD
3. Pelayanan penyusunan dokumen RKPD
4. Pelayanan penyusunan dokumen Renstra
5. Pelayanan penyusunan dokumen Renja
6. Pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan
7. Pelayanan kelitbangan

Arah lokasi pengembangan pelayanan adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Batam.

Tabel II.2 /T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi penataan ruang pada wilayah mainland dan hinterland		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terwujudnya dan terlaksananya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Tersedianya dokumen pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD		45.0%	50.0%	55.0%	60.0%			61.13%	50.00%	55.0%	55.0%		135.8%	100.0%	100.0%	91.7%	
Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD		90.0%	92.0%	94.0%	96.0%			85.4%	98.6%	98.57%	100.0%		94.9%	107.2%	104.9%	104.2%	
Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan		3	4	4	4			1	0	0	2		33.33	0.00	0.00	50.00	

Dari tiga indikator Bapelitbangda, 2 indikator perencanaan dapat dilaksanakan dengan sangat baik.

1. Indikator ke-1 1: Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD
Sesuai tabel di atas, capaian indikator sangat baik.
2. Indikator ke-2 : Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD
Sesuai tabel di atas, capaian indikator sangat baik.
3. Indikator ke-3: Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan
Pada indikator kelitbang angka capaian kinerjanya masih rendah. Pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan kajian/penelitian dikarenakan adanya keterbatasan APBD Kota Batam sehingga perlu dilakukan prioritas program, namun pada tahun 2020 terealisasi kajian/penelitian yang mendukung pembangunan. Dalam perspektif ke depan Kota Batam perlu terus menstimulasi proses penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel II.3/ T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah	1,979,830,513.00	-	-	-	-	1,858,963,119.00	-	-	-	-	93.895	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda	1,979,830,513.00	-	-	-	-	1,858,963,119.00	-	-	-	-	93.895	-	-	-	-	-	-
Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah	339,900,000.00	-	-	-	-	327,650,000.00	-	-	-	-	96.396	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339,900,000.00	-	-	-	-	327,650,000.00	-	-	-	-	96.396	-	-	-	-	-	-
Program perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	230,270,000.00	-	-	-	-	125,104,670.00	-	-	-	-	54.33	-	-	-	-	-	-
Pemantauan Pemanfaatan Ruang Kota Batam	147,460,000.00	-	-	-	-	91,728,670.00	-	-	-	-	62.206	-	-	-	-	-	-

Pendampingan Pembahasan Ranperda dan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam	82,810,000.00	-	-	-	-	33,376,000.00	-	-	-	-	40.304	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2,351,509,000.00	-	-	-	-	1,916,568,111.00	-	-	-	-	81.504	-	-	-	-	-	-
Penyusunan KUA, PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPA Tahun Berjalan	326,600,000.00	-	-	-	-	175,136,114.00	-	-	-	-	53.624	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	430,690,000.00	-	-	-	-	264,098,500.00	-	-	-	-	61.32	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	186,090,000.00	-	-	-	-	147,792,700.00	-	-	-	-	79.42	-	-	-	-	-	-
Penyusunan RKPD Kota Batam	557,820,000.00	-	-	-	-	447,573,373.00	-	-	-	-	80.236	-	-	-	-	-	-

Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021	480,639,000.00	-	-	-	-	402,101,524.00	-	-	-	-	83.66	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Keterpaduan Program Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	249,810,000.00	-	-	-	-	172,745,900.00	-	-	-	-	69.151	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Batam	119,860,000.00	-	-	-	-	80,090,000.00	-	-	-	-	66.82	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	149,776,000.00	-	-	-	-	113,515,000.00	-	-	-	-	75.79	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Buku Daerah Dalam Data	149,776,000.00	-	-	-	-	113,515,000.00	-	-	-	-	75.79	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3,835,942,060	2,279,767,900	2,655,660,952	1,537,396,400	-	3,412,102,582	2,105,095,598	2,585,409,495	1,456,708,050	-	89.0	92.3	97.4	94.8	(255,393,963)	(217,266,060)
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3,835,942,060.00	2,279,767,900.00	2,655,660,952	1,537,396,400	-	3,412,102,582	2,105,095,598	2,585,409,495	1,456,708,050	-	89.0	92.3	97.4	94.8	(255,393,963)	(217,266,060)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	515,076,323	113,433,000	182,461,136	226,500,000	-	475,735,000	101,887,000	174,571,136	191,775,000	-	92.4	89.8	95.7	84.7	(32,064,037)	(31,551,112)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	515,076,323.00	113,433,000.00	182,461,136	89,000,000	-	475,735,000	101,887,000	174,571,136	87,882,500	-	92.4	89.8	95.7	98.7	(47,341,815)	(43,094,723)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	506,485,000	426,027,500	331,442,500	120,192,400	-	466,012,500	374,347,500	331,442,500	115,026,400	-	92.0	87.9	100.0	95.7	(42,921,401)	(38,998,457)
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	-	367,450,000	229,385,000	241,672,500	21,170,000	-	355,672,500	226,035,000	241,672,500	17,404,000	-	96.8	98.5	100.0	82.2	(38,475,557)	(37,585,390)
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	-	55,875,000	125,645,000	42,000,000	57,162,400	-	48,000,000	83,095,000	42,000,000	56,762,400	-	85.9	66.1	100.0	99.3	143,043	973,599
Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan	-	61,160,000	9,000,000	10,000,000	-	-	57,965,000	9,000,000	10,000,000	-	-	94.8	100.0	100.0	-	-	(5,329,445)
Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	-	22,000,000	61,997,500	37,770,000	-	-	4,375,000.00	56,217,500.00	37,770,000.00	-	-	19.9	90.7	100.0	-	-	3,710,555
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	-	-	-	27,360,000	-	-	-	-	27,360,000	-	-	-	-	100.0	-	3,039,999
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam	-	-	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	-	-	-	-	100.0	-	1,611,110

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	374,611,250	100,000,000	17,650,000	249,422,802	-	343,066,250	86,237,780	17,650,000	196,263,663	-	91.6	86.2	100.0	78.7	(13,909,829)	(16,311,400)
Pengembangan Sistem e-planning	-	295,450,000.00	100,000,000.00	17,650,000		-	275,618,000	86,237,780	17,650,000	-	-	93.3	86.2	100.0		(32,827,779)	(30,624,223)
Kajian Teknokratik RPJMD	-	-	-	-	180,494,904	-				127,336,265	-	-	-	-	70.5	20,054,988	14,148,473
Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam	-	-	-	-	68,927,898	-	-	-	-	68,927,398	-	-	-	-	100.0	-	7,658,599
Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	-	79,161,250.00	-	-	-	-	67,448,250.00	-	-	-	-	85.2	-	-	-	-	(7,494,251)

Berdasarkan tabel diatas rasio anantara realisasi dan anggaran pada 4 tahun RPJMD Kota Batam menunjukkan angka positif. Dimana berada diatas 90%, kecuali anggaran pada satu program, yaitu program penelitian dan pengembangan daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran pada program dimaksud yang disebabkan oleh penurunan APBD tahun berkenaan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbang Kota Batam:

2.4.1 Tantangan

Sesuai dengan capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan di Kota Batam tahun 2016-2021, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat PD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.

2.4.2 Peluang

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan dan penelitian serta pengembangan pembangunan antara lain :

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta untuk mewujudkan keseimbangan

pembangunan dalam wilayah, sebagai dasar lokasi investasi dalam wilayah perkotaan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

2. Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapelitbangda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja outcome dan impact yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah Kota Batam;
2. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan;
3. Pelaksanaan evaluasi baru sebatas realisasi anggaran, belum melakukan evaluasi dengan pendekatan gap analysis yang membandingkan (1) realisasi anggaran kegiatan dengan output fisik kegiatan; (2) realisasi anggaran per program dengan masing-masing indikator outcome program; (3) realisasi indikator impact dengan realisasi outcome program nya;
4. Persentase pencapaian sasaran daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 70 persen;

5. Masih lemahnya data dan informasi yang menggambarkan kinerja penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Batam;
6. Belum optimalnya anggaran di bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Masih rendahnya pemahaman aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat dalam penyusunan perencanaan yang terkadang sering berubah-ubah membuat sebagian aparatur perencana sulit memahaminya.
8. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.
10. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
11. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah pada Kota Batam sangat mempengaruhi pada penyusunan rencana oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah. Terutama halnya pada Kota Batam yaitu adanya perubahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga menjadi masalah tersendiri dalam menyusun rencana.
12. Secara umum, perlu dilakukan upgrade kemampuan SDM Perencana, agar memberi kontribusi positif bagi perencanaan pembangunan daerah, baik berupa bimtek/workshop/pelatihan dll.
13. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor perlu mendapat perhatian, agar tidak menghambat proses pekerjaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandar Dunia : Dimaknai sebagai kota diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".

Madani : Mengarahkan masyarakatnya yang berkarakter, ber peradaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society.

Modern : Dimaknai sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Sejahtera : Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, dengan strategi :

1. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalui Penguatan UMKM dan Industri serta peningkatan investasi.
2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi Usaha Besar, UMKM dan IKM.
3. Meningkatkan Pelayanan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
4. Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam.
5. Menyusun Perencanaan Kegiatan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.

Misi Kedua, Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, dengan strategi :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas, dan pengendalian banjir.
2. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegrasi.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman.

Misi Ketiga, Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan strategi:

1. Meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis.
4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi.
5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni dan budaya.
6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.

Misi Keempat, Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland, dengan strategi:

1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland
2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan legalitas lahan.

Misi Kelima, Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien, dengan strategi:

1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis E-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas.
2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN
5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian, pengembangan, maka Bapelitbangda adalah koordinator dalam penyusunan rencana kerja seluruh Perangkat Daerah dalam tercapainya seluruh aspek dari visi dan misi Walikota 2021-2026.

Jika membaca dari misi diatas, maka Bapelitbangda secara tulus memangku **Misi Kelima**, yaitu *Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien dengan strategi, membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas.*

Tantangan dari pelaksanaan misi ini adalah Bapelitbangda secara institusi harus mumpuni secara kelembagaan sebelum menjalankan tugasnya sebagai koordinator perencanaan. Tentunya hal ini harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan berkomitmen maju, serta sarana prasarana yang baik dalam mendukung proses pekerjaan.

Tabel III.1 Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD terkait dengan Peran Bapelitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai LPPD	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Bappenas

dan Renstra Provinsi, yaitu Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan Rensta Bapelitbangda Kota Batam.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Tujuan pada Misi-1 terdiri dari:

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel III.2

Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bapelitbangda dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan Bappenas	Tujuan Renstra	Tujuan Bappeda Provinsi Kepri	Tujuan Renstra Bapelitbangda Kota Batam	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.		Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	1. Masih rendahnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dan renja, renstra dan RPJMD. 2. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja outcome dan impact yang digunakan sebagai	1. Kapasitas dan kompetensi SDM Perencana masih kurang. 2. Prosedur dan mekanisme kerja yang dimiliki (Business Process dan SOP) yang telah disusun belum diimplementasikan dengan baik	1. Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan 2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.						
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.						

			<p>tolak ukur kinerja perangkat daerah Kota Batam</p> <p>3. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan</p>	<p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (<i>IOT/Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan</p>	<p>3.</p> <p>4. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional</p> <p>5. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>6. Regulasi Tentang SPM</p> <p>7. Regulasi Tentang Sdgs Dan Perencanaan Sektoral</p> <p>8. Regulasi Tentang IKU Dan IKK</p> <p>9. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>10. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS</p> <p>11. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun</p>
--	--	--	---	---	--

				pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.	2019 Tentang SIPD 12. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 13. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 14. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 15. Regulasi Tentang Kelitbangan 16. Kebijakan Smart City 17. Kebijakan Satu Data Indonesia
--	--	--	--	---	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kota dalam jangka waktu 20 tahun. RTRW Kota berfungsi sebagai:

- a. Acuan penyusunan RPJPD;
- b. Acuan RPJMD;
- c. Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;
- d. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pemnagunan dalam wilayah kota;
- e. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- g. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pememfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- h. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Keselarasan tugas dan fungsi Bapelitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan secara bersama-sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui pengembangan sistem informasi rencana tata ruang dan foto udara serta peninjauan kembali RTRW dan RDTR.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen KLHS RPJMD adalah untuk memastikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Batam 2021-2026, serta untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang melalui RPJMD. Adapun tujuan penyusunan KLHS RPJMD Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
- b. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel.III.3 Telaah RTRW dan KLHS

No.	Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kriteria Dampak/Risiko LH							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	+	+	+	+	+	+	+	<2 kriteria negatif, tidak perlu KLHS
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	+	+	+	+	+	+	+	<2 kriteria negatif, tidak perlu KLHS
3.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	+	+	+	+	+	+	+	<2 kriteria negatif, tidak perlu KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bapelitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Masih perlu ditingkatkan kualitas fungsi pembinaan terhadap perangkat daerah terkait kualitas perencanaan di seluruh perangkat daerah Kota Batam (ketepatan perencanaan kegiatan dengan permasalahan, ketepatan arsitektur kinerja OPD, menjamin kualitas pelaksanaan monev di masing-masing OPD);
2. Perlu dilaksanakannya sistem evaluasi kinerja yang holistik pada setiap jenjang dokumen perencanaan yang berfokus pada evaluasi anggaran kegiatan, output fisik, outcome program dan impact sasaran daerah;
3. Perlu digunakannya hasil-hasil evaluasi sebagai basis menyusun perencanaan;
4. Pelaksanaan pendekatan penyusunan perencanaan yakni tematik, holistik, integratif, spasial perlu digunakan secara optimal;
5. Menyusun regulasi terkait Sistem Inovasi Daerah;
6. Perlu adanya data terintegrasi di Pemerintah Kota Batam;
7. Penguatan Tim Satu Data;
8. Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka atau Lembaga Penelitian lainnya;
9. Penguatan institusi/ kelembagaan dan alokasi dana Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota Batam.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapelitbangda Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Perumusan indikator kinerja Bapelitbangda Kota Batam yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Bapelitbangda Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Tabel VII.1/Tabel T.C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	22.09	23.00	24.05	25.00	25.50	26	26.50	26.50
2.	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	32%	49.35%	71%	80%	85%	91%	100%	100%
3.	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	N/A	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	N/A	89	90	91	93	95	95

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG
MODERN DAN SEJAHTERA”.**

Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Visi Misi Kota Batam di atas, Bapelitbangda Kota Batam mengemban tugas pada *Misi Kelima, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.*

Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Bapelitbangda Kota Batam memiliki **tujuan** sebagai berikut :

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.”

Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. ***Adapun sasaran pada Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :***

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam mendukung perencanaan
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel IV.1/Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	23.00	24.05	25.00	25.50	26.00	26.50
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	49.35%	71%	80%	85%	91%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	N/A	50%	50%	50%	50%	50%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	90	91	93	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Identifikasi isu-isu strategis dibagi ke dalam beberapa batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan ancaman organisasi). Isu-isu strategis ini berasal dari beberapa isu yang kemudian ditelaah secara kritis sehingga didapatkan isu-isu strategis bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam sebagai berikut :

Analisis Faktor Internal

Kekuatan yang terdiri dari :

1. Tingginya motivasi kerja pegawai
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan
3. Struktur organisasi yang mendukung
4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan

Kelemahan yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat

Analisis Faktor Eksternal

Peluang yang terdiri dari :

1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan yang bisa diikuti
2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan
3. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda
4. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah

Ancaman yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya koordinasi SKPD dengan Bapelitbangda
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah
4. Kurangnya sosialisai kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah

4.3.1 Formulasi Strategi

Dalam melakukan analisis isu-isu strategis ini dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu strategis menjadi suatu formulasi strategi yang dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang akan diambil. Dengan menggunakan formulasi SWOT diperoleh strategi S-T, S-O, W-O dan W-T. Berikut merupakan tabel analisis isu-isu strategis.

INTERNAL	STRENGTHS/KEKUATAN	WEAKNESSES/KELEMAHAN
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya motivasi kerja pegawai 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 3. Struktur organisasi yang mendukung 4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan 2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan 4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat
OPPORTUNITIES/PELUANG	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan yang bisa diikuti 2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan 3. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda 4. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman secara berkala aparatur perencana mengikuti diklat teknis 2. Peningkatan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana 3. Peningkatan etos kerja 4. Bentuk sistem efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan pendidikan bagi personil sesuai dengan kebutuhan 2. Penyediaan software dan datbase yang mendukung proses perencanaan yang transparan dan akuntabel 3. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian aplikatif sebagai rujukan bagi pelaksanaan pembangunan
THREATS/ANCAMAN	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya koordinasi SKPD dengan Bapelitbangda 2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah 4. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuat struktur organisasi dengan menempatkan personil yang handal dalam menjalankan tupoksi dan koordinasi dengan instansi terkait 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Ciptakan koordinasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan 4. Ciptakan sistem informasi data yang akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan personil sesuai dengan bidang keahlian 2. Pembinaan terhadap personil yang kurang disiplin dan termotivasi 3. Perkuat kordinasi internal guna melaksanakan koordinasi dengan SKPD 4. Penyediaan sistem dan software pendukung proses perencanaan

Setelah dilakukan analisis SWOT di atas, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman secara berkala aparatur perencana mengikuti diklat teknis
2. Peningkatan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana
3. Peningkatan etos kerja
4. Bentuk sistem efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan
5. Tingkatkan pendidikan bagi personil sesuai dengan kebutuhan
6. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian aplikatif sebagai rujukan bagi pelaksanaan pembangunan
7. Perkuat struktur organisasi dengan menempatkan personil yang handal dalam menjalankan tupoksi dan koordinasi dengan instansi terkait
8. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
9. Ciptakan koordinasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan
10. Ciptakan sistem informasi data yang akurat
11. Penempatan personil sesuai dengan bidang keahlian

12. Pembinaan terhadap personil yang kurang disiplin dan termotivasi
13. Perkuat kordinasi internal guna melaksanakan koordinasi dengan SKPD
14. Penyediaan sistem dan software pendukung proses perencanaan

4.3.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sarana serta prasarana perencanaan pembangunan di Kota Batam
2. Meningkatkan kualitas kegiatan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi guna memperoleh umpan balik, masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari perencanaan pembangunan.
3. Mewujudkan penguatan dan pengembangan sistem informasi dan data dalam perencanaan pembangunan Kota Batam yang akurat, komprehensif dan selalu terbaharukan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas program Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

Tabel V.1/ T-C.26
Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera			
Misi V : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam mendukung perencanaan	Mengoptimalkan Pelaksanaan dan Tindak lanjut Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Menyelenggarakan Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang aparatur dan reformasi birokrasi, serta bidang aparatur dan reformasi birokrasi
			Menyelenggarakan Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Aspek-Aspek Sosial
			Menyelenggarakan Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum
		Meningkatkan pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen /Kajian/Analisis/Rumusan perencanaan pembangunan yang tersusun

	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi yang intensif dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan baik di bidang PMM, Perekonomian dan SDA serta Prasana wilayah	Menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi, serta monev antar perangkat daerah lingkup bidang PMM, Perekonomian dan SDA serta Prasana wilayah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (tahunan)
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses perencanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi intensif dalam pelaksanaan forum PD dan Musrenbang
		Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW.	Mengoptimalkan proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
		Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan di Perangkat Daerah melalui pembinaan/Pelatihan
		Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
			Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan

			Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan
			Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
		Meningkatkan keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen Perencanaan PD yang dievaluasi
		Meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan	Peningkatan koordinasi, komunikasi antar PD Kota Batam dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan partisipasi publik dan verifikasi bidang perencanaan sektoral
		Meningkatkan prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai	Peningkatan koordinasi pendanaan APBN (Dekon, TP, UB) dan pengelolaan CSR
			Peningkatan Koordinasi TAPD penyusunan APBD
			Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan

	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik	Peningkatan media komunikasi publik dan sistem aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas program Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
 - 1.1.1 Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 1.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota
 - 1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1.2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 1.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
 - 2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

 - 2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
 - 2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 2.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 2.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 2.2.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.3.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 2.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- 2.3.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Kegiatan Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- 3.1.1 Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 3.1.2 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
- 3.1.3 Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah
- 3.1.4 Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi

3.2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- 3.2.1 Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi
- 3.2.2 Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

3.3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- 3.3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

3.4 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 3.4.1 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- 3.4.2 Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 4.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 4.2 **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 4.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4.3 **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 4.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.4 **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.5 **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 4.5.1 Pengadaan Mebel
 - 4.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.6 **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 4.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4.6 **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 4.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
-

Tabel VI.1/Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan,dan PendanaanPerangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR 5889	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Nilai Capaian Perencanaan Kinerja					22.09	23.00	12,483,965,133.00	24.05	15,047,740,098.00	25.00	16,406,934,100.69	25.50	15,681,052,131.24	26.00	18,527,752,155.99	26.50	19,306,600,668.90	26.50	97,454,044,287.82	SELURUH BIDANG	Kota Batam
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan					32%	49.35%	891,143,000.00	71%	1,929,089,205.00	80%	2,026,100,049.49	85%	862,692,566.62	91%	2,555,901,184.60	100%	2,852,815,305.31	85%	11,117,741,311.03	SELURUH BIDANG	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		N/A	N/A	N/A	100%	335,890,305.00	100%	347,444,931.49	100%	241,617,630.00	100%	373,091,106.58	100%	569,696,593.57	100%	1,867,740,567	Bidang PMM	Kota Batam
					Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		N/A	N/A	N/A	100%	185,085,600.00	100%	222,102,720.48	100%	244,312,992.00	100%	268,744,246.20	100%	295,744,158.68	100%	1,215,989,717	Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam
					Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		N/A	N/A	N/A	100%	321,615,425.00	100%	332,678,995.62	100%	344,522,367.86	100%	357,235,243.24	100%	370,917,353.05	100%	1,726,969,385	Bidang IPW	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		N/A	N/A	N/A	15 OPD	335,890,305	15 OPD	347,444,931	15 OPD	241,617,630	15 OPD	373,091,107	15 OPD	569,696,594	15 OPD	1,867,740,567	Bidang PMM	Kota Batam
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah PD bidang Pemerintahan yang telah menyusun dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	N/A	N/A	N/A	9 dok	41,665,370	63 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	43,098,659	63 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	14,226,750.00	99 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	120,385,874.16	63 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	48,052,449	306 dok	267,429,102	Bidang PMM	Kota Batam
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah PD bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	N/A	N/A	N/A	6 dok	76,077,335	42 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	78,694,395	42 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	85,603,210	66 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	84,503,115	42 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	87,739,584	204 dok	412,617,640	Bidang PMM	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan	N/A	N/A		N/A		N/A	-	9 laporan	136,036,170	9 laporan	46,279,928	9 laporan	182,316,098	27 laporan		Bidang PMM	Kota Batam	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJM D pada bidang Pembangunan Manusia	N/A	N/A	N/A	6 laporan	218,147,600	6 laporan	225,651,877	6 laporan	5,751,500	6 laporan	121,922,190	6 laporan	251,588,463	30 laporan	823,061,630	Bidang PMM	Kota Batam
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		N/A	N/A	N/A	10 OPD	185,085,600	10 OPD	222,102,720	10 OPD	244,312,992	10 OPD	268,744,246	10 OPD	295,744,159	10 OPD	1,215,989,717	Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A		N/A	7 dok	-	49 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	62,894,580	49 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	49,828,998	77 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	54,010,471	49 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	62,968,614	238 Dokumen	229,702,662	Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam
				Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	N/A		N/A	38,692,382	21 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)		21 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	71,561,998	33 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	50,000,000	21 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	20,000,000	75 Dokumen	180,254,380	Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	N/A	N/A	N/A	10 Laporan	70,676,003	7 Laporan	74,629,848	7 Laporan	61,835,998	7 Laporan	90,177,038	7 Laporan	99,135,181	38 laporan	396,454,068	Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	N/A	N/A	N/A		3 Laporan		3 Laporan	61,085,998	3 Laporan	54,556,738	3 Laporan	54,556,738	3 Laporan		Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah dievaluasi Dokumen Perencanaan nya	Jumlah PD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	N/A	N/A	N/A	10 OPD	75,717,214	0	84,578,293	0	0	20,000,000	0	59,083,626	10 OPD	239,379,134	Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Batam	
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		N/A	N/A	N/A	18 PD	321,615,425	18 PD	332,678,996	18 PD	344,522,367.86	18 PD	357,235,243	18 PD	370,917,353	18 PD	1,726,969,385	Bidang IPW	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD bidang Infrastruktur yang telah menyusun dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	N/A	N/A	18 PD	91,568,595	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	94,718,555	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	81,989,000	55 (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	101,710,076	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	55,605,572	160 dokumen dan 18 PD	425,591,798	Bidang IPW	Kota Batam
				Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD bidang Kewilayahan yang telah menyusun dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	N/A	N/A	N/A		91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)		91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	98,033,000	143 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	101,710,076	91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	90,287,097	416 dokumen	510,522,992	Bidang IPW	Kota Batam
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah dievaluasi Dokumen Perencanaannya	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	18 PD	108,382,235	N/A	112,110,584	N/A		N/A		N/A		18 PD	220,492,819	Bidang IPW	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada bidang Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	10 Laporan	121,664,595	5 Laporan	125,849,857	5 Laporan	100,407,000	5 Laporan	33,429,217.15	5 Laporan	140,315,128	30 Laporan	453,498,374	Bidang IPW	Kota Batam
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada bidang kewilayahan	N/A	N/A		N/A	-	N/A	0	13 Laporan	64,093,368	13 Laporan	120,385,874.16	13 Laporan	84,709,556	52 Laporan	269,188,798	Bidang IPW	Kota Batam
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		90%	99%	891,143,000.00	96.00%	1,086,497,875	98.00%	1,123,873,402	98.00%	32,239,576.76	98.00%	1,556,830,589	98%	1,616,457,200	98%	6,307,041,642	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan		100%	100%	691,116,000.00	100%	873,930,569	100%	873,930,570	100%	1,255,042,498	100%	1,288,438,566	100%	1,337,785,764	100%	6,320,243,966	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1. Jumlah Dokumen RPJMD yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah Dokumen RPJPD yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Ranwal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka kajian teknokratik)	N/A	1 dok RPJMD	310,186,000.00	-	-	250,000,000	1 dok teknokratik RPJMD	350,000,000	350,000,000	522,066,125	2 dok	1,782,252,125	Bidang Perencanaan Program dan Litbang			
				Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah BA Forum PD tepat waktu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	44 BA	43 BA	49,600,000.00	43 BA	99,553,904	43 BA	43 BA Forum PD dan 1 BA RPJPD	103,098,023	43 BA	106,902,340	43 BA Forum PD dan 1 BA RPJMD	151,499,680	260 BA	610,207,851	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah BA Musrenbang PD tepat waktu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	1 BA	283,230,000.00	1 BA	609,732,252	1 BA	1 BA Musrenbang RKPD dan 1 BA Musrenbang RPJPD	631,438,720	1 BA	654,738,809	1 BA Musrenbang RKPD dan 1 BA Musrenbang RPJPD	494,077,709	8 BA	3,032,949,742	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen RKPd dalam 1 tahun yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	2 dokumen	2 dok RKPd	48,100,000.00	2 dok RKPd	164,644,413	2 dok RKPd	2 dokumen RKPd dan 1 dok RPJPD	170,505,755	2 dok RKPd dan dokumen RPJMD	176,797,417	2 dok RKPd	170,142,250	14 dok	894,834,249	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaan nya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan MENJADI Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan		100%	100%	32,700,000.00	65%	128,636,365	100%	166,011,890	100%	171,921,914	100%	178,265,832	100%	185,093,413	100%	862,629,414	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaan nya yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	43 OPD	43 OPD	16,450,000.00	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	128,636,365	4 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD, P-RKPD dan RPJPD)	166,011,890	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	171,921,914	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	178,265,832	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	185,093,413	43 OPD dan 16 laporan	862,629,414	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen LKPI yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	16,250,000.00	1 laporan	83,930,941	1 laporan	83,930,942	1 laporan	86,918,883	1 laporan	90,126,190	1 laporan	93,578,023	6 laporan	454,734,980	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang data dan informasi perencanaan pembangunan lainnya lengkap MENJADI Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah		100%	100%	167,327,000.00	100%	50,111,508	100%	50,111,508	100%	51,895,478	100%	53,810,421	100%	55,871,360	100%	429,127,274	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Perangkat daerah yang telah dibina dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	32 OPD	32 OPD	167,327,000.00	195 orang	33,819,433	208 orang	33,819,434	208 orang	35,023,406	208 orang	36,315,769	208 orang	37,706,663		344,011,705	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
	Meningkatnya pemanfaatan hasil ketibangan dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti								50%	90,784,500.00	50%	662,335,594.00	50%	611,482,562.35	50%	344,286,268.90	50%	227,684,933.00	50%	1,936,573,858	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil ketibangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief		N/A	N/A		50%	90,784,500.00	50%	662,335,594.00	50%	611,482,562.35	50%	344,286,268.90	50%	227,684,933.00	50%	1,936,573,858	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/dilaksanakan/difasilitasi		N/A	N/A		1 dokumen	4,072,500.00	1 dokumen	404,212,594.00	-	404,362,562.35	2 dokumen	129,523,540.90	1 dokumen	4,696,792.51	5 dokumen	946,867,989.76	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	jumlah Penelitian/kajian bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang di susun/dilaksanakan/difasilitasi/dievaluasi	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 penelitian/kajian	125,000,000.00	N/A	-	1 penelitian/kajian	125,000,000.00	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	jumlah laporan bidang aparatur dan reformasi birokrasi yang di susun/dilaksanakan/difasilitasi/dievaluasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	N/A	N/A	-	1 laporan	4,072,500.00	1 laporan	4,212,594.00	1 laporan	4,362,562.35	1 laporan	4,523,540.90	1 laporan	4,696,792.51	5 laporan	21,867,989.76	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/ dikembangkan MENJADI indeks inovasi daerah		N/A	37.33		50	-	52	200,000,000.00	54	207,120,000.00	56	214,762,728.00	60	222,988,140.48	60	844,870,868.48	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	N/A	N/A		N/A		2 laporan (laporan diseminasi inovasi dan laporan penyusunan Rinduk Kelitban gan)	200,000,000.00	1 laporan	207,120,000.00	2 laporan (laporan diseminasi inovasi dan laporan penyusunan Perwako tentang SIDA)	214,762,728.00	1 laporan	222,988,140.48	6 laporan	844,870,868.48		
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan		N/A	N/A		1 penelitian/kajian (Kajian Risiko Bencana)	86,712,000.00	N/A		N/A		N/A		N/A	-	2 kajian /penelitian	86,712,000.00	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian/kajian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	N/A	N/A		1 penelitian/kajian (Kajian Risiko Bencana)	86,712,000.00	N/A		N/A		1 penelitian/kajian (kajian Risiko Bencana)		N/A	-	2 kajian /penelitian	86,712,000.00	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi		N/A	N/A		N/A	-	1 penelitian/kajian	58,123,000.00	N/A		N/A		N/A		1 penelitian/kajian	58,123,000.00	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian/kajian dan Pengembangan Pekerjaan Umum yang di susun/dilaksanakan/difasilitasi/dievaluasi	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	N/A	N/A		N/A		1 penelitian/kajian	58,123,000.00	N/A		N/A		N/A		N/A	58,123,000.00	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
				Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	N/A	N/A		N/A		1 penelitian/kajian		N/A		N/A		N/A		N/A		Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam
	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan					N/A	N/A	11,592,822,133.00	89	13,027,866,393.00	90	13,718,498,457.19	91	14,206,877,002.27	93	15,627,564,702.49	95	16,226,100,430.60	95	84,399,729,118.55	Bidang Perencanaan Program dan Litbang	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	11,592,822,133.00	100%	13,027,866,393	100%	13,718,498,457	100%	14,206,877,002	100%	15,627,564,702	100%	16,226,100,431	100%	84,399,729,119	Sekretariat	Kota Batam
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan		N/A	N/A		3 dok	105,635,782	3 dok	105,635,782	3 dok	105,635,782	3 dok	114,266,374	3 dok	270,786,514	15 dok	701,960,234	Sekretariat	Kota Batam
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Bapelitbangda yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	N/A	N/A	2 dok	62,019,189	2 dok	62,019,189	2 dok	62,019,189	2 dok	70,649,780	2 dok	132,070,158	12 dok	388,777,505	Sekretariat	Kota Batam
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkungan Bapelitbangda yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	N/A	N/A	1 Laporan	43,616,593	1 Laporan	43,616,593	1 Laporan	43,616,593	1 Laporan	43,616,594	1 Laporan	138,716,356	6 dok	313,182,729	Sekretariat	Kota Batam
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	9,499,322,443.00	100%	10,564,457,237	100%	10,928,422,634	100%	11,743,467,846	100%	13,155,524,954	100%	12,296,575,912	100%	68,187,71,026	Sekretariat	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang		9,436,762,443.00	43 orang	10,487,249,621	43 orang	10,769,548,351	45 orang	11,487,249,621	50 orang	13,078,317,338	55 orang	12,119,368,296	55 orang	67,378,495,671	Sekretariat	Kota Batam
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 keg	10 keg	62,560,000.00	396 dok (jumlah sub kegiatan kali 12 bulan)	77,207,616	396 dok (jumlah sub kegiatan kali 12 bulan)	158,874,283	396 dok (jumlah sub kegiatan kali 12 bulan)	256,218,225	396 dok (jumlah sub kegiatan kali 12 bulan)	77,207,616	396 dok (jumlah sub kegiatan kali 12 bulan)	1980 dok	177,207,616	809,275,355	Sekretariat	Kota Batam
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		N/A	N/A		100%	119,515,000	100%	201,181,667	100%	119,515,000	100%	119,515,000	100%	300,034,501	100%	859,761,167	Sekretariat	Kota Batam
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A	-	N/A	119,515,000	N/A	201,181,667	56 paket	119,515,000	56 paket	119,515,000	56 paket	300,034,501	56 paket	859,761,167	Sekretariat	Kota Batam
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	1,537,423,300.00	100%	1,417,409,102	100%	1,580,742,436	100%	1,417,409,102	100%	1,417,409,102	100%	2,337,854,232	100%	9,708,247,274	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	4,142,000.00	1 paket	4,706,520	1 paket	4,706,520	1 paket	4,706,520	1 paket	4,706,520	1 paket	271,226,023	5 paket	294,194,103	Sekretariat	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dipenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	372,361,300.00	9 paket	581,084,290	9 paket	581,084,290	9 paket	581,084,290	9 paket	581,084,290	9 paket	647,603,793	9 paket	3,344,302,253	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	118,633,000.00	4 paket	83,800,364	4 paket	165,467,031	4 paket	83,800,364	4 paket	83,800,364	4 paket	71,647,979	16 paket	607,149,102	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	199,500,000.00	1 paket	134,286,325	1 paket	123,114,805	1 paket	123,114,805	1 paket	123,114,805	1 paket	289,634,308	5 paket	992,765,048	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	-	N/A	-	1 dokumen	11,171,520	1 dokumen	11,171,520	1 dokumen	11,171,520	1 dokumen	277,691,023	1 jenis	#VALUE!	Sekretariat	Kota Batam
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 kali	97 kali	842,787,000.00	116 laporan	613,531,603	120 laporan	695,198,270	116 laporan	613,531,603	116 laporan	613,531,603	130 laporan	780,051,106	598 laporan	4,158,631,185	Sekretariat	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	100%	14,900,000.00	100%	25,083,300	100%	106,749,967	100%	25,083,300	100%	25,083,300	100%	225,083,300	100%	421,983,167	Sekretariat	Kota Batam
				Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 jenis	2 jenis	14,900,000.00	2 paket	25,083,300	2 paket	106,749,967	2 paket	25,083,300	2 paket	25,083,300	2 paket	225,083,300		421,983,167	Sekretariat	Kota Batam
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	420,466,240.00	100%	547,061,472	100%	547,061,472	100%	547,061,472	100%	547,061,472	100%	547,061,472	100%	3,155,773,600	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jasa	2 jasa	38,275,200.00	2 laporan	78,940,442	2 laporan	78,940,442	2 laporan	78,940,442	2 laporan	78,940,442	2 laporan	78,940,442	laporan	432,977,410	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksana penyedia jasa pelayanan umum Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 orang	11 orang	382,191,040.00	11 laporan	468,121,030	11 laporan	468,121,030	11 laporan	468,121,030	11 laporan	468,121,030	11 laporan	468,121,030	55 laporan	2,722,796,190	Sekretariat	Kota Batam

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	100%	120,710,150.00	100%	248,704,500	100%	248,704,500	100%	248,704,500	100%	248,704,500	100%	248,704,500	100%	1,364,232,650	Sekretariat	Kota Batam
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 Unit	88,415,150.00	7 Unit	207,449,000	7 Unit	207,449,000	7 Unit	207,449,000	7 Unit	207,449,000	7 Unit	207,449,000	40 unit	1,125,660,150	Sekretariat	Kota Batam
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	39 Unit	32,295,000.00	42 Unit	41,255,500	42 Unit	41,255,500	42 Unit	41,255,500	42 Unit	41,255,500	42 Unit	41,255,500	249 unit	238,572,500	Sekretariat	Kota Batam

BAB VIII

PENUTUP

Disusunnya RENCANA STRATEGIS (**RENSTRA**) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam ini sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, dengan harapan dapat memberikan arahan, bimbingan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Bapelitbangda Kota Batam, karena RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA-PD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Bapelitbangda Kota Batam, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian (Pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana yang akhirnya dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan Kota Batam Yang berkualitas dan terintegrasi selaras dengan rencana Kota Batam untuk menciptakan " *Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera*".

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI